

Dr. Hendri: Kabinet Merah Putih VS Kabinet Bayangan di Medan Perang Kognitif

Updates. - KORLANTAS.ID

Aug 8, 2026 - 21:44



Dr. Ir. Hendri, ST., MT., Ketua Umum Jurnalis Nasional Indonesia (INI)

OPINI - Perang politik hari ini tidak selalu berlangsung di gedung parlemen. Tidak pula selalu ditandai demonstrasi, pengerahan massa, atau benturan terbuka antara pemerintah dan oposisi. Medan tempur paling menentukan justru telah berpindah ke ruang yang jauh lebih halus: "pikiran manusia". Di sanalah perang kognitif berlangsung.

Senjatanya bukan peluru. Amunisinya adalah informasi, data, persepsi, narasi, algoritma, video pendek, podcast, survei, komentar pakar, potongan pidato, meme, hingga satu kalimat yang sengaja dibuat viral.

Dalam medan perang semacam itulah "Kabinet Merah Putih" sesungguhnya menghadapi lawan yang jauh lebih kompleks daripada oposisi politik konvensional. Lawannya bisa kita sebut "Kabinet Bayangan".

Bukan kabinet yang hendak mengambil alih kekuasaan. Bukan pemerintahan tandingan. Bukan pula kelompok rahasia yang berkumpul untuk menjatuhkan pemerintah.

Kabinet Bayangan adalah metafora bagi sekumpulan intelektual, akademisi, ekonom, ahli hukum, mantan birokrat, teknokrat, profesional, tokoh masyarakat, peneliti, praktisi, dan anak-anak muda kritis yang berdiri di luar struktur kekuasaan, tetapi memiliki kemampuan untuk membedah setiap keputusan pemerintah.

Mereka tidak punya menteri.

Tetapi mereka punya argumentasi.

Mereka tidak memiliki kementerian.

Tetapi mereka memiliki laboratorium pemikiran.

Mereka tidak mengendalikan APBN.

Tetapi mereka dapat mengendalikan percakapan publik.

Dan dalam perang kognitif, kemampuan mengendalikan percakapan terkadang sama pentingnya dengan kemampuan mengendalikan birokrasi.

Ketika Pemerintah Tidak Lagi Memonopoli Kebenaran

Dahulu pemerintah memiliki keuntungan besar dalam menguasai informasi. Negara mempunyai televisi, radio, kantor berita, humas kementerian, hingga jaringan birokrasi dari pusat sampai daerah. Sekarang peta itu berubah total.

Seorang profesor dari ruang kerjanya dapat menerbitkan analisis yang dalam hitungan jam dibaca jutaan orang.

Seorang ekonom dapat membantah argumentasi kementerian melalui podcast.

Seorang ahli hukum dapat membedah satu peraturan pemerintah melalui YouTube.

Seorang mahasiswa bahkan dapat membuat grafik sederhana yang membuat kebijakan negara diperdebatkan selama sehari-hari.

Artinya, negara tidak lagi memonopoli panggung komunikasi. Kabinet Merah

Putih boleh memiliki kekuasaan administratif, tetapi *"kekuasaan atas persepsi publik tidak otomatis berada di tangannya"*.

Inilah persoalan besar pemerintahan modern. Sebuah kebijakan bisa benar secara administratif tetapi kalah secara komunikasi. Bisa tepat secara ekonomi tetapi dianggap keliru secara sosial. Bisa mempunyai dasar hukum tetapi kehilangan legitimasi di mata masyarakat.

Dalam perang kognitif, yang diperebutkan bukan hanya pertanyaan, *"Siapa yang benar?"* Yang lebih berbahaya adalah pertanyaan: *"Siapa yang dipercaya?"*

Kabinet Bayangan Jangan Dimusuhi

Kesalahan terbesar pemerintah adalah apabila setiap kritik dianggap sebagai serangan. Lebih berbahaya lagi jika setiap orang yang berbeda pendapat segera dikelompokkan sebagai oposisi. Negara demokratis membutuhkan kritik sebagaimana tubuh membutuhkan sistem imun.

Pemerintahan yang dikelilingi orang-orang yang selalu berkata, *"Siap, bagus, benar, lanjutkan,"* justru sedang berjalan menuju jebakan yang serius.

Karena kekuasaan mempunyai penyakit klasik: *"echo chamber"*.

Pejabat mendengar laporan bawahannya.

Bawahan ingin menyenangkan atasannya.

Data buruk diperhalus.

Masalah diperkecil.

Keberhasilan dibesar-besarkan.

Akhirnya yang sampai ke meja pengambil keputusan bukan lagi kenyataan, melainkan kenyataan yang telah dipoles.

Di titik itulah *Kabinet Bayangan* memiliki fungsi strategis.

Mereka menjadi *"cermin yang tidak bisa diperintah untuk mempercantik wajah"*.

Jika program pemerintah bagus, katakan bagus.

Jika keliru, katakan keliru.

Jika datanya lemah, bongkar.

Jika kebijakannya tepat, dukung.

Jika pelaksanaannya menyimpang, kritik.

Dengan demikian, Kabinet Bayangan sebenarnya bukan musuh Kabinet Merah Putih.

Ia justru bisa menjadi **red team nasional**—kelompok yang sengaja menguji kelemahan kebijakan sebelum kelemahan itu berubah menjadi krisis.

Pertarungan Data Melawan Propaganda

Namun *Kabinet Bayangan* juga tidak boleh berubah menjadi sekadar kumpulan komentator yang haus panggung.

Kritik tanpa data sama buruknya dengan propaganda pemerintah tanpa fakta.

Karena perang kognitif memiliki sisi gelap.

Informasi dapat direkayasa.

Potongan video dapat dipisahkan dari konteks.

Statistik dapat dipilih sesuai kepentingan.

Algoritma dapat membentuk gelembung opini.

Kebohongan yang diulang ribuan akun bahkan dapat terasa lebih meyakinkan daripada satu laporan ilmiah setebal 300 halaman.

Karena itu perang antara Kabinet Merah Putih dan Kabinet Bayangan tidak boleh berubah menjadi pertandingan siapa paling viral.

Yang harus dipertandingkan adalah "*kualitas gagasan*".

Menteri berbicara dengan data.

Pakar membantah dengan data.

Pemerintah membuka metodologi.

Akademisi menguji metodologi.

Pemerintah menawarkan kebijakan.

Kabinet Bayangan menawarkan alternatif.

Publik kemudian mempunyai kesempatan menilai.

Begitulah demokrasi yang dewasa bekerja. Bukan dengan membungkam suara yang berbeda, melainkan dengan mempertemukan argumentasi di ruang terbuka.

Medan Perang Sesungguhnya Bernama Smartphone

Ada satu fakta yang sering diremehkan elite politik: rakyat Indonesia hari ini membawa medan perang politik di dalam sakunya. Namanya "*smartphone*".

Di layar beberapa inci itulah citra pemerintah dibangun dan dihancurkan. Menteri

dapat bekerja berbulan-bulan, tetapi satu video berdurasi 30 detik dapat mengubah persepsi terhadap pekerjaannya.

Satu program bernilai triliunan rupiah dapat kehilangan legitimasi karena komunikasi publik yang buruk. Sebaliknya, kebijakan biasa dapat tampak revolusioner karena dikemas melalui strategi komunikasi yang hebat.

Inilah sebabnya perang kognitif berbeda dengan perang konvensional. Dalam perang biasa, siapa menguasai wilayah dianggap menang. Dalam perang kognitif, siapa menguasai **interpretasi terhadap kenyataan** berpeluang menang. Dan algoritma media sosial tidak peduli siapa menteri dan siapa profesor. Algoritma hanya bertanya:

Apa yang membuat manusia berhenti menggulir layar?

Apa yang membuat orang marah?

Apa yang membuat orang takut?

Apa yang membuat orang membagikan konten?

Karena emosi merupakan bahan bakar paling murah dalam ekonomi perhatian. Itulah yang membuat demokrasi menghadapi tantangan serius.

Jangan Sampai Pemerintah Berperang Melawan Rakyatnya Sendiri

Kabinet Merah Putih harus memahami satu hal penting: kritik publik bukan perang terhadap negara.

Akademisi yang mempertanyakan kebijakan bukan musuh pemerintah.

Media yang membongkar kelemahan program bukan otomatis oposisi.

Aktivis yang mengkritik bukan berarti ingin pemerintahan gagal.

Justru pemerintah yang kuat adalah pemerintah yang mampu mengatakan:
"Silakan kritik kebijakan kami. Kalau argumentasi Anda lebih baik, kami perbaiki."

Kalimat sederhana seperti itu mempunyai kekuatan politik luar biasa. Sebab ia menunjukkan bahwa pemerintah tidak takut terhadap pikiran.

Yang harus dilawan bukan kritik.

Yang harus dilawan adalah disinformasi.

Yang harus dilawan bukan perbedaan pendapat.

Yang harus dilawan adalah manipulasi.

Yang harus dikalahkan bukan kaum intelektual.

Yang harus dikalahkan adalah kebohongan.

Kabinet Bayangan Pun Harus Berani Bertanggung Jawab

Tetapi tuntutan moral yang sama berlaku kepada para pengkritik. Jangan karena berada di luar pemerintahan lalu merasa bebas mengatakan apa saja.

Pakar memiliki tanggung jawab akademik.

Media memiliki tanggung jawab jurnalistik.

Aktivis memiliki tanggung jawab moral.

Influencer memiliki tanggung jawab sosial.

Sekali informasi dilempar ke ruang digital, ia dapat bergerak jauh melampaui niat awal pembuatnya. Karena itu Kabinet Bayangan yang ideal bukanlah kabinet para pembenci pemerintah. Ia harus menjadi "*kabinet alternatif pemikiran*".

Jika mengkritik pendidikan, berikan konsep pendidikan.

Jika mengkritik ekonomi, berikan model ekonomi.

Jika mengkritik pangan, tunjukkan solusi pangan.

Jika mengkritik hukum, tawarkan desain reformasinya.

Jika mengkritik digitalisasi pemerintah, tunjukkan arsitektur teknologinya.

Jangan hanya mengatakan: "*Ini salah.*"

Beranilah melanjutkan: "*Ini alternatifnya.*"

Di situlah kritik berubah menjadi kontribusi.

Indonesia Membutuhkan Dua Kabinet

Mungkin terdengar paradoks, tetapi Indonesia justru membutuhkan keduanya. Kita membutuhkan "Kabinet Merah Putih" yang mempunyai kewenangan untuk mengambil keputusan.

Tetapi pada saat yang sama kita juga membutuhkan "Kabinet Bayangan" yang mempunyai keberanian untuk mempertanyakan keputusan.

Yang satu bekerja dari dalam kekuasaan.

Yang satu mengawasi dari luar kekuasaan.

Yang satu mengeksekusi.

Yang satu menguji.

Yang satu mempunyai kewenangan.

Yang satu mempunyai independensi.

Jika keduanya bekerja dengan sehat, masyarakat memperoleh keuntungan. Namun jika keduanya memilih menjadi mesin propaganda yang saling menghancurkan, Indonesia yang akan membayar harganya.

Karena perang kognitif paling berbahaya bukan ketika pemerintah bertarung melawan oposisi. Perang kognitif paling berbahaya terjadi ketika *"rakyat tidak lagi mengetahui siapa yang harus dipercaya"*.

Ketika semua berita dianggap propaganda.

Ketika semua kritik dianggap pesanan.

Ketika semua pakar dicurigai memiliki kepentingan.

Ketika semua pernyataan pemerintah dianggap kebohongan.

Pada titik itu yang runtuh bukan kabinet. Yang runtuh adalah *"kepercayaan publik"*.

Siapa yang Akan Menang?

Kabinet Merah Putih memiliki kekuasaan.

Kabinet Bayangan memiliki kebebasan.

Kabinet Merah Putih mempunyai birokrasi.

Kabinet Bayangan mempunyai jaringan gagasan.

Kabinet Merah Putih mempunyai anggaran.

Kabinet Bayangan mempunyai independensi.

Tetapi dalam perang kognitif, semua itu belum menentukan kemenangan. Pemenangnya adalah pihak yang paling mampu membangun *"kepercayaan"*.

Bukan siapa yang paling banyak memasang baliho.

Bukan siapa yang paling sering muncul di televisi.

Bukan siapa yang mempunyai buzzer paling banyak.

Bukan pula siapa yang mempunyai pengikut media sosial terbesar.

Pada akhirnya masyarakat akan menilai satu hal yang sangat sederhana: *"Apakah kata-kata sesuai dengan kenyataan?"*

Jika "Kabinet Merah Putih" mampu membuktikannya, seribu serangan narasi tidak akan mudah merobohkannya.

Jika Kabinet Bayangan mampu menawarkan kritik berdasarkan ilmu, data dan

kepentingan publik, pemerintah justru seharusnya mendengarkannya.

Tetapi jika keduanya tenggelam dalam propaganda, Indonesia akan memasuki perang yang jauh lebih berbahaya daripada pertarungan politik biasa. Perang memperebutkan pikiran rakyat.

Dan sejarah menunjukkan: *ketika sebuah pemerintahan kehilangan wilayah, wilayah masih bisa direbut kembali. Tetapi ketika sebuah pemerintahan kehilangan kepercayaan rakyat, bahkan kekuasaan yang besar sekalipun dapat berubah menjadi istana yang berdiri di atas pasir.*

Maka pertanyaan pentingnya bukan lagi: *"Kabinet Merah Putih atau Kabinet Bayangan, siapa yang menang?"*

Pertanyaan yang lebih menentukan adalah: *"Siapa yang lebih dipercaya rakyat ketika perang kognitif benar-benar dimulai?"*

Jakarta, 08 Agustus 2026

Dr. Ir. Hendri, ST., MT
Ketua Umum Jurnalis Nasional Indonesia (INI)